

## Strategy of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Service in Empowering Community Small and Medium Enterprises in Labuhan Batu Regency

### Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu

Ricky Pane <sup>1)</sup>; Muhammad Arif <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Progam Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: <sup>1)</sup> [Rickypane02@gmail.com](mailto:Rickypane02@gmail.com); <sup>2)</sup> [mhdarif1895@gmail.com](mailto:mhdarif1895@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [8 April 2022]

Revised [15 April 2022]

Accepted [22 April 2022]

#### KEYWORDS

Empowerment, Small and Medium Enterprises, Labuhan Batu

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Peran UKM dalam pendampingan pemerintah daerah harus dilihat dari: Situasinya sebagai pemeran utama dalam latihan keuangan di berbagai daerah, pemasok pekerjaan terbesar, pemain penting dalam kemajuan bisnis terdekat dan penguatan daerah lokal dan mata air pembangunan. Legislatif terdekat dalam memahami lingkungan yang layak bagi UMKM belum sepenuhnya dipahami, terlihat dari sistem dan pengaturan strategi publik bahwa orang miskin telah setuju dengan UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat dalam batas-batas moneter iklan item sebenarnya membatasi pengambilan keputusan tingkat lingkungan sehingga Daerah Pemerintah belum memiliki opsi untuk memberikan bantuan modal dan perangkat. - perangkat yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM penghibur sehingga pelaku UMKM mencari modal sendiri dan alat untuk berhijab. Selain itu, permasalahan juga datang dari UMKM yang terkait dengan administrasi amatir, hal ini dikarenakan terbatasnya informasi dan SDM berbakat yang diklaim oleh UMKM sehingga otoritas publik yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam pembuatan strategi harus membantu pihak swasta untuk memberikan persiapan kepada UMKM. untuk melewati. sehingga bisnis mereka dapat mengisi di kemudian hari. Tujuan di balik penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melibatkan usaha kecil menengah (UMKM) melalui dinas binaan dan UKM di Kabupaten Labuhan Batu. Pemeriksaan yang digunakan adalah metodologi yuridis empiris. metode yuridis empiris adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian dengan melihat informasi opsional dan kemudian dilanjutkan dengan memeriksa informasi penting yang ditemukan di lapangan.

#### ABSTRACT

The role of SMEs in assisting local governments must be seen from: Their situation as the main players in financial training in various regions, the biggest job suppliers, important players in the progress of nearby businesses and strengthening local areas and development springs. The closest legislature in understanding a proper environment for MSMEs is not yet fully understood, it can be seen from the system and public strategy arrangements that the poor have agreed with MSMEs so that MSME actors are hampered within the monetary limits of item advertisements actually limiting environmental level decision making so that Regional. Governments do not yet have options. to provide capital and equipment assistance. - tools that can be used by entertainer MSME actors so that MSME actors look for their own capital and tools to wear the hijab. In addition, problems also come from MSMEs related to amateur administration, this is due to the limited information and talented human resources claimed by MSMEs so that public authorities who have the power and power in making strategies must help the private sector to provide preparations for MSMEs. to pass through. so that their business can fill up at a later date. The purpose behind this research is to find out the role of local government in involving small and medium enterprises (MSMEs) through the fostered service and SMEs in Labuhan Batu Regency. The examination used is an empirical juridical methodology. empirical juridical method is a strategy used to solve problems in research by looking at optional information and then proceeding to examine important information found in the field.

## PENDAHULUAN

Setiap kali kita melihat fenomena sosial selama beberapa waktu terakhir, kita akan fokus pada wawasan tentang pandemi penyakit Coronavirus 2019, atau disingkat COVID-19. Dampak terjadi karena kekhasan ini adalah penyesuaian kecenderungan individu, budaya, dalam hal apa pun. Latihan-latihan penting pada saat yang sama dihentikan, akses antar negara ditutup, beberapa Pengawasan di negara-negara tertentu sangat ketat untuk menjaga penyebaran infeksi ini. Pastinya Hal ini membuat ekonomi dunia berhenti. Dengan asumsi bahwa kita melihat informasi dari berita otoritas wawasan Badan Pusat

Statistik (BPS) mengabstraksi perekonomian Indonesia dilihat dari barang-barang dalam negeri bruto. Jika belum jelas, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah semua nilai tenaga kerja dan produk konklusif dibuat oleh setiap unit keuangan. PDB ini adalah salah satu penanda signifikan untuk Mengetahui keadaan keuangan di suatu negara dalam periode tertentu, baik berdasarkan premis nilai relevan serta berdasarkan biaya tetap (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Perekonomian Indonesia sebagian besar adalah usaha kecil dan menengah Satu organisasi peninjau menyatakan bahwa kelimpahan empat individu paling boros identik dengan 100.000.000 individu yang paling miskin, kelayakan kolektif dari empat individu paling kaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar Dolar AS, setara dengan kelimpahan gabungan dari ratusan juta orang yang paling tidak beruntung (DW.com). Selain BPS Jawa Barat mengungkap evaluasi keuangan tahun 2016 bahwa tingkat UMK non agraris sesuai status usaha, 98,84 persen usaha kecil dan kecil dan 1,16 persen (Persentase UMK Non agraris) Seperti yang ditunjukkan oleh Status Bisnis, 2016) adalah usaha besar dan menengah. (Astari, S : 2019)

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Labuhan Batu memiliki program di mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satunya telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut:

1. Membuat Koperasi Usaha Kecil Memperluas usaha menengah (UKM) modal usaha.
2. Membuat Koperasi Usaha Kecil Sedang (UKM) yang mendominasi.
3. Mengakui perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)
4. Mengakui asosiasi UKM dan SDM Manajemen Koperasikualitas.

Koperasi sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerah. Dengan berbagai proyek yang menyenangkan seperti dana cadangan dan uang muka, ultra mikro dan lainnya, mungkin untuk membantu usaha mandiri. Juga berikan energi kepada pengelola uang, yang membutuhkan bantuan. Usaha mikro Kecil dan Menengah atau disingkat sebagai UMKM adalah organisasi yang dilakukan oleh daerah dan mengacu pada organisasi keuangan yang berguna yang dimiliki oleh orang atau badan usaha sesuai standar yang ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2008 yang diperbaharui dalam UU No. 11 Tahun 2020 (dkupp.semarangab.go.id). Karena daerah setempat sebagai pelaku yang bermanfaat sangat penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat daerah setempat karena dapat memperluas posisi terbuka dan menawarkan jenis bantuan keuangan yang serupa dengan daerah setempat, mempengaruhi jalannya nilai dan perluasan gaji individu, memberi energi pembangunan moneter, dan mengambil bagian dalam mengakui kekuatan negara. (Kusdi : 2009)

## LANDASAN TEORI

Menurut Handoko (2009:141). yang menyatakan bahwa strategi planing adalah cara paling umum untuk memilih tujuan yang berwenang; jaminan sistem, pengaturan dan proyek- proyek utama yang diperlukan untuk target-target ini; dan meletakkan teknik yang diharapkan untuk menjamin bahwa strategi dan pendekatan dilakukan. Seperti yang ditunjukkan oleh Said dan Widjaja. 2007:1. Koperasi dan UKM membuat komitmen kritis untuk perluasan pekerjaan dan pintu terbuka bisnis, pengembangan barang-barang publik, perluasan pengiriman, serta perluasan dan pemerataan pembayaran.

Penguatan sebagai interpretasi dari “penguatan” sebagaimana dikemukakan oleh para peneliti yang berbeda, pada hakikatnya bercirikan sebagai berikut. Membantu klien dengan memperoleh kemampuan untuk hanya memutuskan dan memutuskan langkah-langkah yang akan mereka buat terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi dampak batasan individu dan sosial terhadap aktivitas. Hal ini dilakukan melalui perluasan kapasitas dan kepastian untuk memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya, termasuk pertukaran kekuatan dari iklim.” (Baridi 2005:3)

Ide penguatan diarahkan untuk memungkinkan bidang keuangan dan sosial, dengan tujuan bahwa pertemuan tujuan dapat menangani bisnis mereka, kemudian, pada saat itu, pasar dan struktur siklus periklanan yang umumnya stabil sehingga pertemuan tujuan dapat melakukan sosialnya. kapasitas lagi sesuai pekerjaan sosial dan tugas mereka. Penguatan wilayah lokal merupakan komponen fundamental yang memungkinkan masyarakat umum untuk membuat hak dan dari perspektif yang unik mendorong diri mereka sendiri dan mencapai kemajuan. Penguatan daerah sendiri merupakan sumber



dari apa yang dalam ilmu politik disinggung sebagai fleksibilitas publik. Hal ini sebenarnya dimaksudkan bahwa dalam hal daerah memiliki batas moneter yang tinggi, penting untuk fleksibilitas keuangan publik. (Rukminto Bachtiar, 2008: 7)

Pemerintah adalah salah satu orang yang memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan negara. Namun, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan setiap negara pada dasarnya adalah sesuatu yang serupa bervariasi dalam perincian dan pelaksanaannya. Target pendekatan Indonesia sendiri tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tepatnya UU No UUD 1945 terbagi menjadi 2 tujuan mendasar, yaitu tujuan umum khusus dan tujuan global. Ketiga kapasitas ini saling terkait satu sama lain. Pemerintah sebagai perakitan mekanik Negara berusaha untuk menawarkan bantuan terbaik untuk mengatasi masalah daerah setempat di semua area. Dalam kapasitas penguatan yang akan mendesak daerah setempat untuk memiliki kebebasan. Ini diharapkan memiliki opsi untuk menarik

Keluar kapasitas yang diklaim oleh daerah setempat yang bertekad untuk mengerjakan alam Sumberdaya Manusia (SDM). Usaha Miniatur, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha yang ditekuni dengan berbagai pegangan usaha yang menyentuh kepentingan daerah setempat. Secara finansial, pelaku UMKM memiliki andil yang cukup besar untuk dikembangkan perekonomian suatu negara dalam perasaan menambah penciptaan lapangan kerja juga (PDB).

Selama pemulihan keuangan Indonesia, sektor UMKM berperan yang sangat penting dalam kemajuan moneter yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang perspektif. Pertama- tama, jumlah perusahaan sangat besar dan ada di setiap bidang ekonomi. Kedua, ia memiliki potensi luar biasa dalam mempertahankan pekerjaan. Dengan melihat potensi diklaim oleh UMKM, maka diperlukan suatu metodologi dari otoritas publik dalam penguatan. Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil terlebih lagi Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa alasan dunia usaha ini adalah untuk merakit ekonomi publik dalam terang hanya mayoritas keuangan pemerintahan aturan. Kemajuan publik diselesaikan oleh individu dan otoritas publik, oleh individu sebagai entertainer yang tugasnya sangat penting untuk kemajuan atau dikenal sebagai entertainer utama kemajuan. Otoritas publik mengambil bagian dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, menjaga dan mendorong lingkungan dan lingkungan yang mendukung perkembangan dunia usaha. (Heriko, Yusuf : 2018)

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yakni metodologi yuridis empiris. metode yuridis empiris adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian dengan melihat informasi opsional dan kemudian dilanjutkan dengan memeriksa informasi penting yang ditemukan di lapangan. Titik fokus penelitian tersebut adalah bagaimana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Labuhan Batu dapat mengembangkan usaha masing-masing. Handoko (2009:141) menyatakan bahwa pengaturan penelitian adalah cara paling umum untuk memilih tujuan otoritatif, memutuskan prosedur, pendekatan dan proyek utama yang diperlukan untuk tujuan ini dan memutuskan teknik yang diharapkan untuk menjamin bahwa sistem dan pengaturan telah dijalankan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pencapaian tujuan yang diperhitungkan, berwawasan luas, dan pertimbangan yang matang tentang sarana yang diharapkan untuk bekerja dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang mantap dengan visi, misi, sasaran, dan sasaran yang telah ditetapkan. mengatur. Petunjuk langkah demi langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan elemen penting dalam proses perencanaan yang strategis.

Petunjuk langkah demi langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah pengaturan usaha yang menjangkau jauh dan terkoordinasi yang menggabungkan dasar pendekatan dan proyek. Pengaturan pada dasarnya adalah pengaturan yang tuan rumah diselesaikan oleh pertemuan terkait dan ditetapkan untuk diisi sebagai aturan. (Fandy Tjiptono : 2006)

Seperti yang ditunjukkan di lapangan, para analis mengamati bahwa program-program kemajuan yang dilakukan oleh otoritas publik masih di bawah norma yang berhasil dan produktif. Kekeliruan yang disayangkan menyebabkan pemerasan di lapangan, misalnya karena bisnis yang kacau dan keberadaannya tidak diketahui. Efek yang diberikan oleh hadirnya acara tersebut juga terlihat dari tidak adanya pertimbangan dari banyak pelaku UMKM untuk mematuhi pedoman yang diberikan oleh otoritas publik dan batasan dari pelaku UMKM itu sendiri. Sejumlah besar pelaku UMKM seringkali akan membidik hanya pada kemajuan bisnis tanpa bergantung pada otoritas publik dan maaf, para ahli harus mengatakan bahwa jika otoritas publik tidak menghalangi pengaturan yang menyulitkan pelaku UMKM, kemudian, pada saat itu, para pelaku bisnis dapat meningkatkan dalam mengembangkan bisnis mereka.

Sangat mungkin beralasan bahwa kemajuan-kemajuan dari Dinas Koperasi dan UKM saat ini sedang dilakukan, misalnya pembuatan dataset UMKM, kerangka data untuk membuat UKM atau membangun pajangan di daerah, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. sudah benar-benar selesai atau masih dalam proses sehingga hasil UKM belum bisa dirasakan oleh sebagian besar pelaku bisnis. UMKM (khususnya yang jauh dari pusat/kantor pemerintahan di Kabupaten Labuhan Batu pasti tidak akan merasakan dampak kemajuan ini karena tidak mengikuti perkembangan data pemerintah dan seringkali hanya menyoroti bisnis yang dijalankannya. daripada orang-orang yang merasakan keuntungan.

Peningkatan UMKM memainkan peran penting, khususnya memiliki pilihan untuk peningkatan dalam penciptaan dan kemajuan organisasi melalui kegiatan luar biasa yang akan mempengaruhi organisasi untuk masuk ke wilayah yang lebih unggul.

Ada beberapa factor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan program di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhan Batu, antara lain:

1. Sebagian besar UKM menempati area santai tanpa bantuan izin untuk beroperasi sehingga sulit bagi UKM untuk bersaing dalam instrumen pasar.
2. Pembatasan akses UKM untuk aset yang berguna, terutama modal, bahan alami, inovasi, yayasan dan data pasar.
3. Ketiadaan pengembangan dalam produksi pelaku usaha baru disebabkan karena rendahnya pandangan dan terbukanya pintu usaha bagi jiwa inovatif.
4. Kemampuan pengawas UKM masih rendah.
5. Kekaguman orang terhadap barang-barang terdekat mereka sendiri masih belum memadai.

Dalam sistem usaha menurut Robbins (dalam Kusdi, 2009: 90), teknik usaha adalah kepastian luas pasar yang akan dilayani oleh perkumpulan, bermacam-macam atau jenis pelanggan, perluasan topografi, dan jenis barang atau administrasi yang akan diiklankan. Dinas Koperasi dan UKM memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan UKM di Kabupaten Bandung untuk melakukan metodologi sosialisasi, sehingga organisasi mereka akan bertambah. Teknik pengendalian biaya untuk melakukan program kerja jelas ada cadangan yang disetorkan ke Dinas Koperasi dan UKM, namun setiap tahun meragukan mengandalkan gaji lokal dan masalah permodalan pengusaha UMKM telah dikendalikan bahwa pengusaha UMKM harus berurusan dengan modal mereka dengan keuangan daerah. Untuk rencana keuangan yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program kerja, penyelidikan pencipta memikirkan bahwa rencana pengeluaran yang dapat diakses.

Sebagaimana ditunjukkan oleh UUD 1945, kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Moneter dalam Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus difungsikan sebagai bagian fundamental ekonomi individu yang memiliki posisi, pekerjaan, dan potensi tegas untuk memahami konstruksi moneter publik yang lebih disesuaikan, menciptakan, dan dipelihara adil. Pada dasarnya, usaha mini, kecil dan menengah adalah jenis usaha moneter latihan bermanfaat yang dilakukan oleh orang atau elemen bisnis individu yang memenuhi pedoman bisnis miniatur, kecil, dan sedang (Anggraeni, 2013). Gaji UMKM adalah upah yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukannya. Untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, pelaku UMKM perlu fokus pada perspektif pendukung dalam mempertahankan usahanya, meliputi: 1) Status Kepemilikan Lokasi Usaha UMKM, 2) Jenis Usaha terlebih lagi 3) Lama Usaha.

Pengaruh Covid-19 terhadap 'Pendapatan UMKM'. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan di berbagai bidang. Pengaturan pemerintah terkait dengan pandemi telah menghambat latihan setiap hari



hingga latihan trading yang dilengkapi dengan miniatur, kecil, dan apalagi usaha menengah (UMKM). Pandemi COVID-19 berdampak pada tidak sedikit UMKM yang mengalami kesulitan, terlihat dari penurunan gaji menjadi tidak dibayar dengan cara apa pun dan terpaksa meninggalkan bisnis. (Ami, 2020)

UMKM juga dapat dicirikan sebagai unit khusus yang berguna dimana bisnis bersifat otonom yang dilakukan oleh individu atau elemen bisnis di semua bidang ekonomi daerah (Maramis, 2019). Dengan hormat UMKM sendiri memiliki premis yang halal, tepatnya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Miniatur, Usaha Kecil dan Menengah, dalam undang- undang itu diperjelas tentang pengertian UMKM, secara spesifik sebagai berikut (Noviasari, 2016)

1. Usaha miniatur adalah organisasi yang berguna yang diklaim oleh individu atau sebaliknya suatu substansi bisnis yang telah memenuhi model hukum diakomodasi dalam peraturan ini.
2. Usaha swasta adalah bisnis keuangan yang bermanfaat dan berdiri yang diisi oleh orang dan elemen bisnis yang tidak diingat untuk tambahan atau bagian dari bisnis yang memiliki dimiliki dan memenuhi ukuran usaha mandiri yang telah dikelola dalam peraturan terkait.
3. Usaha menengah adalah usaha keuangan yang bermanfaat dan tetap soliter diselesaikan oleh orang atau elemen bisnis yang bukan merupakan organisasi atau bagian dari organisasi yang gaji dikendalikan oleh peraturan.

Seperti yang baru-baru ini diklarifikasi, UMKM berperan dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia karena dapat menciptakan lapangan pekerjaanderajat yang luas dan dapat membantu otoritas publik dalam meringankan kebutuhan sehingga efek yang besar adalah tingkat kemiskinan dapat dikurangi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dimodifikasi melalui rencana sistem pendampingan 2016-2021, dimana persiapan dan tahapan-tahapan vital divisi dalam memampukan UKM penghibur sudah jelas terlihat. Program pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam menciptakan UKM berjalan dengan baik dimana cenderung terlihat beberapa proyek. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Labuhan Batu memiliki program di mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satunya telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut:

1. Membuat Koperasi Usaha Kecil Memperluas usaha menengah (UKM) modal usaha.
2. Membuat Koperasi Usaha Kecil Sedang (UKM) yang mendominasi.
3. Mengakui perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)
4. Mengakui asosiasi UKM dan SDM Manajemen Koperasikualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astari, S. (2019). Tata Cara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat Dalam Pembangunan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
- Fandy Tjiptono. 2006. Manajemen Administrasi. Edisi pertama. Yogyakarta : Andi
- Hariyoko, Yusuf. 2018. Kemajuan UMKM di Kabupaten Tuban. Surabaya: FISIP UNTAG SURABAYA.
- Kusdi. (2009). Teori Otoritatif dan Administratif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nengsih, M. K., Gayatri, I. A. M. E. M., Wagini, K. C. S., & Indriasari, N. (2021, May). Strategy of Developing: Five Competitive Force Model Case Study: SMEs Fajarwonk. In *BISIC 2020: Proceedings of the 3rd Beehive International Social Innovation Conference, BISIC 2020, 3-4 October 2020, Bengkulu, Indonesia* (p. 180). European Alliance for Innovation.
- Raselawati Ade 2011. Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM di Indonesia
- Sudarsana, I. K., Abdussakir, A., Yuniningsih, Y., Kustini, K., Sari, A. E., Wikansari, R., ... & Suleman, A. R. (2020, June). The Economy Society Improvement for Supporting Education in Indonesia. In *ICASI 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation, ICASI 2020, 20 June 2020, Medan, Indonesia* (p. 30). European Alliance for Innovation.

Yuda, Choirizal Pahlawan Prawira. 2019. Investigasi Pengaruh Modal Lama Usaha dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan UMKM Sektor Perdagangan di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.